



RENJA TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN



KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN PASURUAN
JL. RAYA RACI KM. 9 TELP.(0343)450 5657, FAX (0343)n 450 5639
Website: dpmptsp.pasuruankab.go.id
E-mail : dpmpt.pasuruankab@gmail.com



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen rencana memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikator yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dinas Penyelenggara Pelayanan Publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam mendukung proses pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan membuat suatu rencana kerja agar dalam melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan visi, misi, maupun sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan tema “ HILIRISASI INDUSTRI DAN PENGOLAHAN POTENSI UNGGULAN DAERAH UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN ”, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 mengarah pada hilirisasi industri pengolahan potensi daerah serta memberikan nilai tambah ekonomi dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, tema tersebut dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan kualitas

SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing, Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku, pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, kolaboratif dan berbasis digital.

1.2. **Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tahun 2024-2026.
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 198 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
18. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
19. Peraturan Bupati Nomor 100.3.3.2/666/HK/424.013/2025 Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026

1.3. **Maksud dan Tujuan**

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam satu tahun anggaran 2026 dan sebagai dasar Penyusunan RKA tahun 2026.
2. Memberi gambaran konsistensi pelaksanaan dalam mencapai target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Menjamin keterkaitan antara komponen Renja OPD dan komponen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antara komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen hingga penjabaran ke dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

3.3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

3.3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung 33 Program Prioritas Perangkat Daerah

3.3.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Dokumen Renja 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka akan disampaikan evaluasi tahun 2024.

Evaluasi Renja tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, serta penyusunan strategi yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kinerja ditahun selanjutnya.

Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian atau perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta perencanaan tahun kedepannya.

Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disajikan melalui evaluasi realisasi belanja serta evaluasi kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2024. (Tahun Berjalan) secara terperinci dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Resntra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bidang Penanaman Modal									
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal (%)	82		80	80	100%	82	82	100%
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif	jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	1		1	0	0%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Kemudahan Penanaman Modal	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)								
	Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan (dokumen)	2		1	1	100%	2	2	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1					1	1	100%
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (dokumen)	4		1	1	100%	4	4	100%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor (%)	70		60	60	100%	70	70	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase kegiatan promosi investas daerah yang terlaksana (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota (dokumen)	8		8	7	88%	8	8	100%
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal (dokumen)			1		0%		0	0%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yg menyampaikan LKPM (%)	75		65	75	115%	75	75	100%
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi	Jumlah Pengendalian palaksanaan penanaman	25		30	144	480%	25	25	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	kewenangan daerah kabupaten/kota	modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana (kegiatan)								
	Subkegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)	8		6	2	33%	8	8	100%
	Subkegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	300		250	280	112%	300	300	100%
	Subkegiatan Pengawasan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil	25		15	70	467%	25	25	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha. (kegiatan usaha)								
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal (%)	100		100	75	75%	100	100	100%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah	Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi. (laporan)	4		4	4	100%	4	4	100%
	Subkegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	1		1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	elektronik yang diolah , dikaji dan dimanfaatkan (dokumen)								
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital (layanan)	66		64	64	100%	65	65	100%
	Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pemohon yg melaksanakan pemantauan pemenuhan keputusan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan pm bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi dan pengaduan (pemohon)	37000		36000	4016	11%	37000	37000	100%
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis	47000		46000	15570	34%	47000	47000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (kegiatan usaha)								
	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten / kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	60		40	62	155%	60	60	100%
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (orang)	450		410	316	77%	450	450	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi kantor dan sarana prasarana dalam kondisi baik (%)	80		80	80	100%	80	80	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen SAKIP (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	4		4	4	100%	4	4	100%
	Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	12		12	12	100%	12	12	100%
	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (laporan)	5		5	5	100%	5	5	100%
	Kegiatan administrasi keuangan	Persentase laporan keuangan yang sesuai	100		100	75	75%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)								
	Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	308		322	322	100%	308	308	100%
	Subkegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	24		24	24	100%	24	24	100%
	Subkegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan (dokumen)	12		12	12	100%	12	12	100%
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2		2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1		1	2	200%	1	1	100%
	Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1		1	2	200%	1	1	100%
	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	12		12	9	75%	12	12	100%
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12		12	9	75%	12	12	100%
	Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12		12	9	75%	12	12	100%
	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (unit)			1	1	100%		1	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian DPMPTSP	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	5		5	5	100%	5	5	100%
	Subkegiatan Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	50		50	50	100%	50	50	100%
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	2		2	3	150%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12		12	9	75%	12	12	100%
	Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	2		2		0%	2	2	100%
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD kondisi baik (%)	100		100	100	100%	100	100	100%
	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1		1	3	300%	1	1	100%
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara	11		11	9	82%	11	11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	perizinan kendaraan operasional atau lapangan	dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (unit)								
	Sub Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5		5	4	80%	5	5	100%
	Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	15		15	7	47%	15	15	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (%)	100		100	100	100%		0	
	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (unit)	2		1	2	200%		0	

Kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang perizinan dan investasi di daerah Kabupaten Pasuruan. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2024 diberikan anggaran sebesar Rp. 10,192,543,309.00 (Sepuluh milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang dialokasikan pada :

- A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- C. Program Promosi Penanaman Modal.
- D. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 terserap sebesar 91,31% atau Rp 9.306.709.522,- realisasi tersebut dapat dilihat pada grafik penyerapan anggaran terhadap setiap program sebagai berikut:



Dari grafik diatas dapat dilihat dari sejumlah kegiatan yang ditetapkan pada program kerja tahun 2024 masih terdapat permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga pencapaiannya tidak maksimal. Pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal menyerap 68.64%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan pengelolaan data tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam hal cetak dokumen, selanjutnya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun selanjutnya akan dioptimalkan perencanaan penggunaan anggaran.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan melalui Tujuan yaitu “Meningkatkan Nilai Investasi Daerah” dengan Indikator Kinerja yaitu “Nilai Investasi yang terealisasi”. Sedangkan Sasaran yang pertama yaitu “Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah” dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Investor”, sasaran yang kedua yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dengan Indikator Kinerja yaitu “Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dan sasaran yang terakhir yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan Indikator Kinerja yaitu “Nilai SAKIP”.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Tujuan				
Meingkatkan Nilai Investasi	Nilai realisasi investasi	9,3 Triliun	12,9 Triliun	138.71%
Sasaran				
Meningkatnya Pelayanan Investasi daerah	Persentase Peningkatan Investor	2,7	7,83 %	290,00 %
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	95,81	113,08 %
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan DPMPSTP	Nilai SAKIP yang terealisasi	84,50	84,55	100,05 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan maupun sasaran capaiannya diatas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja target sasaran strategi dari setiap indikator tujuan dan sasaran telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penanaman modal secara baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 6 program, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Capaian kinerja tahun 2024 evaluasinya sebagai berikut:

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	80 %	80 %		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Minimnya anggaran yang direncanakan untuk subkegiatan tersebut, sehingga untuk menghasilkan produk yang sesuai indikator sangat sulit tercapai	melakukan pergeseran anggaran yang sekiranya bisa menjadikan produk sesuai dengan indikator yang ditetapkan
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Minimnya anggaran yang direncanakan untuk subkegiatan tersebut, sehingga untuk menghasilkan produk yang sesuai indikator sangat sulit tercapai	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	2		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota perlu penajaman kembali belum memungkinkan untuk menghasilkan output sehingga dibutuhkan penajaman dalam pelaksanaan Subkegiatan tersebut	Dilakukan pergeseran anggaran dari Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dan Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ke Subkegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	berdasarkan hasil evaluasi triwulan I dan kebutuhan pemenuhan LPPD, Evaluasi Kinerja PJ Bupati dan penilaian PTSP, maka pelaksanaan Subkegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal harus segera dilaksanakan sehingga perlu penambahan anggaran.	agar supaya subkegiatan tersebut bisa terealisasi maka diperlukan tambahan anggaran.
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	65%	65%		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	100%	100%		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	belum maksimal nya penyerapan anggaran dari yang direncanakan, sehingga penyerapan anggaran tersebut dimaksimalka.	memaksimalkan anggaran dan kinerja sesuai dengan target yg rencanakan pada tribulan berikutnya.
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	terdapat reconfusing anggaran	memaksimalkan anggaran dan kinerja sesuai dengan target yg rencanakan pada tribulan berikutnya.
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	%	%		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	%		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	Subkegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum adanya permasalahan/keluhan	Inventarisir permasalahan dari pengaduan yang bersumber dari pelaku usaha secara langsung atau melalui

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
merealisasikan Kegiatan Usahanya				Website yang telah tersedia maupun Kotak Saran.
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	Realisasi anggaran belum maksimal dikarenakan antara indikator dengan output nya tidak relevan.	Bimtek akan dilaksanakan pada tribulan IV
Pengawasan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	Untuk Subkegiatan Pengawasan penanaman modal terdapat efesiensi anggaran.	memaksimalkan anggaran dan kinerja sesuai dengan target yg rencanakan pada tribulan berikutnya.
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	100%		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	Realisasi anggaran belum maksimal dikarenakan antara indikator dengan output nya tidak relevan.	Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD terkait dalam rangka Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	65 layanan	65 layanan		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8000 pelaku usaha	8000 pelaku usaha		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7000 Pelaku Usaha	7000 Pelaku Usaha	Untuk Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik terdapat realisasi kinerja sebanyak 5.914 Pelaku Usaha dari Target 13.000 Pelaku Usaha, sehingga tidak sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.780.905,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 148.200.000,- dan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.	Untuk Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	410 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha	Untuk Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko tidak bisa terealisasi maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang memadai.	mengevaluasi perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	70 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	Untuk Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 8,605.500 dari Pagu Anggaran Rp. 47.672.000 sehingga realisasi	Untuk Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lebih intensif lagi dengan keuangan terkait realisasi anggaran.

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			anggaran belum maksimal dikarenakan ada realisasi anggaran yang masuk dalam triwulan berikutnya.	

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan wajib Penanaman Modal. Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal telah melaksanakan program dan kegiatan, dengan beberapa capaian indikator kinerja utama adalah jumlah nilai investasi yang terealisasi, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase peningkatan investor, serta nilai SAKIP yang terealisasi.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai investasi yang terealisasi			9,3	12,90 T - 16,50 T	13 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	12,85 T		13 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	Catatan Analisis: Capaian realisasi Investasi tahun 2024 melebihi target 138.71 %, sedangkan target investasi propinsi 115 T
1	Persentase peningkatan investor			2,7 %	0,02 %	0,04 %	0,06 %	7,83 %				
2	IKM DPMPTSP			84,5	95,81	95,82	95,83	96.12		95,82	95,83	
3	Nilai SAKIP yang terealisasi			84,5	85	85,05	85,10	84,55	85	85,05	85,1	
	Persentase Peningkatan Investasi		v	5,3	5,31	5,32	5,33	5,3				

A. Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah

Pencapaian Tujuan ini diperoleh melalui indikator Nilai investasi yang terealisasi. Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	Target Akhir 2025
1	Nilai Investasi yang terealisasi	Triliun	9,3	12,85	138 %	16,50 T

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap tujuan ada peningkatan sebesar 12,85 dari target 9,3 Triliun dengan indikator nilai investasi yang terealisasi dengan realisasi kinerja 138% dari target 9,3 Triliun.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi pencapaian indikator sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja tujuan adalah Nilai Realisasi Investasi keberhasilan atas peningkatan kinerja pada tahun 2024. Pada dimensi nilai realisasi investasi sebesar 12,85 Triliun, Nilai Realisasi Investasi selama 1 Tahun telah tercapai dan BERHASIL. Keberhasilan ini di pengaruhi beberapa faktor yaitu:

- a. Semakin banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Pasuruan yg mengetahui Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Ini di sebabkan, DPMPTSP Kabupaten Pasuruan sering mengadakan Sosialisai atau Bimtek kepada pelaku usaha, pemberitahuan melalui sosial media dan WA group Discussion para pelaku usaha yg ada di DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.
- b. Adanya beberapa pembangunan Proyek atau Perusahaan baru di Kabupaten Pasuruan.

B. Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	Target Akhir 2025
1	Persentase peningkatan investor	Persentase Peningkatan Investor	2,7 %	7,83 %	290,00 %	0,02 %
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00	96,12	113,08 %	95,81
3	Nilai SAKIP	Nilai	84,50	84,55	100,05 %	85,00

Pada Indikator kinerja sasaran pertama adalah Persentase peningkatan investor sebesar 7,83 %. Karena pada tahun 2023 DPMPTSP tidak memakai indicator tersebut. Keberhasilan ini di pengaruhi beberapa faktor yaitu:

- Adanya beberapa perluasan atau pengembangan Proyek di Kabupaten Pasuruan.
- Iklim Investasi yg kondusif

Indikator Kinerja sasaran kedua adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan terkait perolehan kepuasan layanan perizinan Berusaha dan Non Berusaha dan layanan MPP mencapai 95,81. Keberhasilan pencapaian nilai IKM dikarenakan terkait dengan pelayanan pengaduan yang tepat waktu dan langsung ditindak lanjuti. Selain itu alur proses perizinan sudah terintegrasi dengan dinas teknis sesuai dengan SOP.

Indikator Kinerja sasaran ketiga adalah Nilai SAKIP DPMPTSP mendapatkan nilai 84,55 masuk kategori A. Di bandingkan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DPMPTSP 2024, pada tahun 2023, nilai SAKIP DPMPTSP mengalami peningkatan dikarenakan lengkapnya dokumen-dokumen yang ditinjau lanjut oleh inspektorat.

2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi investasi daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu, memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur dan Informasi Kinerja Investasi, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

- 1) Belum adanya Perda Penanaman Modal, RUPM dan Perda Kebijakan Insentif untuk mendorong investasi;
- 2) Belum adanya kebijakan pemberian insentif daerah kepada pelaku usaha;
- 3) Belum Optimalnya penawaran peluang investasi / kurangnya promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial;
- 4) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha;
- 5) Belum tersedianya pemetaan produksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku untuk perusahaan PMA/PMDN;
- 6) Belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai SOP
- 7) Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;
- 8) Minimnya investasi ekonomi berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan;

- 9) Belum ada kerjasama penanaman modal antara pemerintah dengan dunia usaha;
- 10) Terbatasnya interoperabilitas data dan sistem informasi penanaman modal.

2.3.1 Penentuan Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Dari hasil telaahan terhadap dokumen rencana strategis kementerian investasi dan dokumen rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur maka ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Beberapa hasil identifikasi tersebut antara lain:

Identifikasi faktor internal :

a. Kekuatan (strength)

1. Adanya potensi investasi wilayah
2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian menguasai bidangnya
3. Mempunyai sarana dan prasarana
4. Adanya komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong pelaksanaan perizinan satu pintu

b. Kelemahan (weakness)

1. Kurang tersedianya data-data dan informasi peluang investasi yang up to date
2. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online.
3. Kurang optimalnya penguasaan di bidang penanaman modal.
4. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

Identifikasi faktor eksternal:

a. Peluang (Opportunities)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2. Masih tersedianya kawasan industri.
3. Adanya tawaran promosi investasi di luar daerah.

b. Ancaman (threats)

1. Semakin banyaknya daerah lain sebagai tujuan penanaman modal.
2. Belum tergalinya potensi investasi daerah
3. Belum optimalnya potensi investasi daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah tersebut maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aplikasi SIAP Maslahat dengan melakukan pengembangan sistem menjadi aplikasi SMART .
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait NIB melalui Layanan OB-Van.
3. Penyusunan Perda Penanaman Modal, RUPM, Perda Kebijakan Insentif.
4. Pembuatan Investor Lounge yang informatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Rancangan awal Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Ranwal Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengusung tema Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 mengusung tema **“Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan”**. Prioritas pembangunan ditetapkan sejumlah 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing;
2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku ;
3. Pengembangan industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang kompetitif;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengambil peran dalam mendukung prioritas pembangunan nomor 1 (Satu), yaitu **“Peningkatan SDM tenaga kerja yang berdaya saing ”** dan nomor 4 (empat) yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital”**

Urusan Pemerintahan Bidang Penanamam Modal terdiri dari 6 program 13 kegiatan 37 sub kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis 2024-2026 yang telah disusun, namun sesuai dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 :

- Jumlah Program : 6 Program
- Jumlah Kegiatan : 13 kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 37 sub kegiatan

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
sesuai Renstra 2025-2029						sesuai kebutuhan tahun rencana sesuai pemetaan					
TOTAL					Rp14.796.655.507,00	TOTAL				Rp6.823.344.800,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	82	Rp2.100.000.000,00	Program pengembangan iklim penanaman modal		Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	83	Rp621.354.000,00	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang		Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas	80	Rp500.000.000,00	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang		Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal	100	Rp23.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		/ Insentif dibidang Penanaman Modal			Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>		<i>jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	<i>1</i>	<i>Rp500.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>		<i>jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	<i>1</i>	<i>Rp23.000.000,00</i>	<i>Perda Pemberian Fasilitas Insentif kemudahan berusaha</i>
	Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota		Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	<i>1</i>	Rp1.500.000.000,00	Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota		Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	<i>2</i>	Rp598.354.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal</i>		<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal</i>	<i>1</i>	<i>Rp500.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal</i>		<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal</i>	<i>1</i>	<i>Rp292.145.000,00</i>	<i>Perda RUPM</i>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	daerah kabupaten/ kota		Daerah Kabupaten/ Kota			daerah kabupaten/ kota		Daerah Kabupaten/ Kota			
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/ Kota		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/ kota	4	Rp1.000.000.000, 00	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/ Kota		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/ kota	4	Rp306.209.000,0 0	I-PRO
	kegiatan Fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/ kota		Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan fasilitasi Hilirisasi Investasi (badan usaha)	1	Rp100.000.000,0 0	kegiatan Fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/ kota		Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan fasilitasi Hilirisasi Investasi (badan usaha)	1	Rp0,00	
	Subkegiatan Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/ kota		Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota (badan usaha)	1	Rp100.000.000,0 0	Subkegiatan Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/ kota		Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota (badan usaha)	1	Rp0,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor	72%	Rp1.750.000.00 0,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor	70%	Rp250.000.000, 00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Persentase kegiatan promosi investas daerah yang terlaksana	100	Rp1.750.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Persentase kegiatan promosi investas daerah yang terlaksana	100	Rp250.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	8	Rp1.450.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	8	Rp247.000.000,00	
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	1	Rp300.000.000,00	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	1	Rp3.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	71	Rp1.074.085.750,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	71	Rp204.429.000,00	
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana	12	Rp1.074.085.750,00	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana	12	Rp204.429.000,00	
	Subkegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	20	Rp343.901.500,00	Subkegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	20	Rp111.918.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Subkegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha		jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	200	Rp385.184.250,00	Subkegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha		jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	200	Rp45.721.000,00	
	Subkegiatan Pengawasan penanaman modal		jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.	120	Rp345.000.000,00	Subkegiatan Pengawasan penanaman modal		jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.	120	Rp46.790.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100	Rp121.000.000, 00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100	Rp19.990.000,0 0	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah		Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi.	4	Rp121.000.000,0 0	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah		Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi.	4	Rp19.990.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Subkegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah , dikaji dan dimanfaatkan	1	Rp121.000.000,00	Subkegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah , dikaji dan dimanfaatkan	4	Rp19.990.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	92	Rp925.000.000,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	65	Rp262.003.280,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah pemohon yg melaksanakan pemantauan pemenuhan keputusan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan pm bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi dan pengaduan (pelaku usaha)	10550	Rp925.000.000,00	Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah pemohon yg melaksanakan pemantauan pemenuhan keputusan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan pm bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi dan pengaduan (pelaku usaha)	10550	Rp262.003.280,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	Rp300.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	Rp17.000.000,00	
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik		jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	510	Rp350.000.000,00	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik		jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	510	Rp114.999.980,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	62	Rp231.786.500,00	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	62	Rp80.005.660,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	200	Rp43.213.500,00	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	200	Rp49.997.640,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi	1	Rp8.826.569.757,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi	80%	Rp5.465.568.520,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	Rp283.492.509,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	Rp57.533.500,00	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	Rp77.440.000,00	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	Rp8.981.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	12	Rp11.533.115,00	Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12	Rp9.585.000,00	
	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	Rp194.519.394,00	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	Rp38.967.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan administrasi keuangan		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	Rp4.590.755.681,00	Kegiatan administrasi keuangan		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	Rp3.561.502.721,00	
	Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	21	Rp3.948.899.081,00	Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	21	Rp3.467.542.721,00	
	Subkegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	24	Rp557.132.400,00	Subkegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	24	Rp30.000.000,00	
	Subkegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	Rp84.724.200,00	Subkegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	Rp63.960.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100	Rp1.098.909.774,00	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100	Rp455.729.990,00	
	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Rp10.023.761,00	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Rp10.149.400,00	
	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Rp106.352.149,00	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Rp125.112.450,00	
	Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Rp49.236.751,00	Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Rp23.900.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Rp3.630.000,00	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Rp3.102.500,00	
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp171.823.059,00	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp98.275.640,00	
	Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp757.844.054,00	Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp195.190.000,00	
	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		Rp0,00	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		Rp0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian DPMPTSP		Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	Rp282.384.960,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian DPMPTSP		Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	Rp172.287.500,00	
	Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	Rp197.735.780,00	Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	Rp89.920.000,00	
	Subkegiatan Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45	Rp84.649.180,00	Subkegiatan Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	43	Rp82.367.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100	Rp681.041.710,00	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100	Rp743.089.009,00	
	Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	Rp8.651.500,00	Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	Rp1.700.000,00	
	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp545.802.154,00	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp625.070.500,00	
	Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp126.588.056,00	Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Rp116.318.509,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase BMD kondisi baik	100	Rp1.039.985.123,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase BMD kondisi baik	100	Rp475.150.800,00	
	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp187.345.967,00	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp87.337.500,00	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	12	Rp267.812.609,00	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	12	Rp59.999.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Sub Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp59.317.000,00	Sub Kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp210.000.000,00	
	Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Rp525.509.547,00	Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Rp117.813.500,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	0	Rp850.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	0	Rp275.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	Rp850.000.000,00	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		Rp275.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan disusun melalui usulan dan koordinasi masing- masing Bidang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan. Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan yang berpedoman pada Renstra Dinas.

Program serta Kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan telah disusun dengan melihat segala kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kecamatan Prigen	jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	15.000.000,00	Pokok Pikiran

Tabel diatas menunjukkan beberapa usulan dari stakeholder DPMPTSP Kabupaten Pasuruan, seperti kecamatan dan pengusaha. Beberapa usulan meliputi pelaksanaan sub kegiatan mengenai sosialisasi OSS, dan juga untuk bimbingan atau pendampingan OSS untuk UMK dan Non UMK.

Dengan dukungan sumber daya finansial yang terbatas DPMPTSP Kabupaten Pasuruan berusaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat secara efektif. Celah ini bisa memotivasi DPMPTSP Kabupaten Pasuruan untuk melakukan inovasi pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan s/d 2029 "Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan". Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu "Maju", "Sejahtera", dan "Berkeadilan". Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pokok visi "Maju", mengandung makna dan sekaligus spirit bahwa Kabupaten Pasuruan ke depan harus mengalami "Kemajuan di Segala Bidang". Kemajuan tersebut dicerminkan dengan semakin tinggi dan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja yang merata dan layanan publik lainnya yang berkualitas. Berbagai kemajuan tersebut didukung dengan layanan infrastruktur dan pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pembangunan (Good Governance). Kondisi ini juga didukung dengan terjalinnya kemitraan Hexahelix, yaitu konsep kolaborasi yang melibatkan enam pihak, yang terdiri atas pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan hidup, dan media massa. Konsep ini akan menjadi stimulus berbagai sektor, seperti inovasi pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Implementasi konsep ini juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan kolaborasi dalam membangun daerah. Pelayanan publik pun telah berbasis teknologi informasi (Digital) yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang lebih adaptif, professional dan humanis dalam menghadapi kondisi/kebutuhan masyarakat dan daerah yang berubah cepat (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), komoleksitas atau kerumitan (Complexcity), dan ketidakjelasan (Ambigue). Pada sisi lain, pokok visi "maju" juga bermakna bahwa pondasi cara berpikir dan berperilaku sumberdaya manusia Kabupaten Pasuruan yang maju, yaitu sumberdaya manusia yang

beriman dan berbudaya serta masyarakat yang saleh yang tercermin dari kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan harmonis.

- 2) Pokok visi “Sejahtera” menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari perekonomian daerah yang kuat dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Pokok Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini tercermin dari peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembangunan yang merata dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan pun mulai kuat dengan produk asli Pasuruan yang kompetitif dan situasi yang kondusif untuk berusaha maupun berinvestasi. Dukungan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan pendukung pembangunan ekonomi dan sosial pun telah cukup tinggi.
- 3) Pokok visi “Berkeadilan” bermakna kondisi Kabupaten Pasuruan dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang semakin mengecil. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok masyarakat atau wilayah marginal terlihat jelas, sehingga kesetaraan gender dan perekonomian yang inklusif juga meningkat signifikan. Keadilan pembangunan antar generasi pun terlihat dengan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa terkecuali (No One Left Behind).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan				
Meningkatnya Daya Saing iklim investasi Daerah	Nilai Realisasi investasi	12,85 T	12,90 T - 16,50 T	13,00 T - 16,51 T
Sasaran				
Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Persentase peningkatan investor	7,83%	0,02%	0,04%
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,81	95,81	95,82
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	84,55	85	85,05
IKK				
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	5,30%	5,31%	5,32%

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi dan kewenangannya untuk itu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan “Meningkatnya Daya Saing iklim investasi Daerah”.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis Perubahan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Nilai Investasi Daerah, dengan indikator : Nilai investasi yang terealisasi = 12,85 T
- b) Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan indikator: nilai IKM = 95.82
- c) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan, dengan indikator: Nilai SAKIP = 85.05

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2025 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) program, 13 (tigabelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 terlampir.

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPJMD dan IKU

Indikator Sasaran RPJMD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi Kabupaten Pasuruan tahun n *sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2021, nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM Angka Pertumbuhan Investasi	13,00 T - 16,50 T	Persentase peningkatan Investor	$\frac{(\text{Pelaku Usaha tahun } n - \text{Pelaku Usaha tahun } n-1)}{\text{Pelaku Usaha tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$	0,04	1.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						2.Program Promosi Penanaman Modal
						3.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						4.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai IKM pada tahun N $\text{IKM} = \frac{(\text{TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{RW IV})}{4}$	95,82	Program pelayanan penanaman modal
			Nilai Sakip Tahun N	Nilai SAKIP DPMPTSP	85,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 akan dilakukan melalui 1 program penunjang dan 5 program utama, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan. berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2024-2026. Beberapa program, kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan oleh DPMPTSP tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 3) Evaluasi kinerja Perangkat daerah

II. Administrasi keuangan perangkat daerah

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD

III. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

- 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

IV. Administrasi umum perangkat daerah

- 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 5) Fasilitas kunjungan tamu

- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan

VI. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I. Penetapan pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

- 1) Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota
- 2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

I. Penetapan pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

I. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 3) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 4) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

E. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

I. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 3) Pengawasan Penanaman Modal

F. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

I. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah tahun 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengusung tema Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 mengusung tema **“Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan”**).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengambil peran dalam mendukung prioritas pembangunan nomor 1 (Satu), yaitu **“Peningkatan SDM tenaga kerja yang berdaya saing”** dan nomor 4 (empat) yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital”**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan intervensi melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tema 2026	Prioritas Pembangunan			Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
	Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peningkatan Produktivitas UMK melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	PPD 3 : Pengembangan industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang kompetitif	Pengelolaan Objek (DTW) dan kawasan pendukung Destinasi kepariwisataan	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal	Persentase peningkatan investor
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		

Tema 2026	Prioritas Pembangunan			Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
	Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	

Tema 2026	Prioritas Pembangunan			Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
	Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				merealisasikan Kegiatan Usahanya			
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
				Pengawasan Penanaman Modal			
			Digitalisasi layanan publik, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DL	
	PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif,	RESPONSIF: Peningkatan Kemudahan Izin Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat

Tema 2026	Prioritas Pembangunan			Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
	Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kolaboratif dan berbasis digital			Fasilitas/Insentif Daerah	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		KOLABORATIF : Peningkatan kerjasama dan komitmen pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa dan Dunia Usaha		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
		Peningkatan yanblik dan administrasi pemerintahan terintegrasi berbasis elektronik		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			

Tema 2026	Prioritas Pembangunan			Subkegiatan	Kegiatan	Program	IKU PD
	Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			

3.3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Tabel 3.4

Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/.. disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan	DPMPS TP	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Propinsi dalam	1 Dokumen	Rp 23.000.000,00	DAU				
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	2 Dokumen	Rp 292.145.000,00					

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perang kat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/.. disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/ kota (dokumen)	2 Dokumen	Rp 306.209.000,00					
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kab/Kota	Tersusunnya Strategis promosi penanaman modal yang menjadi Kab/kota	1 Dokumen	Rp 3.000.000	DAU				
			Program pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Subkegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan	300 pelaku usaha	Rp 45.721.000	DAU				

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perang kat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/.. disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						berusaha berbasis risiko							
			Program pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		Rp 111.918.000					
		DPMPT SP	Program pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Pengawasan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi	15 Kegiatan Usaha	Rp 46.790.000					

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perang kat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/.. disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.							
	Digitalisasi layanan public, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	DPMPT SP	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Peirzianan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian	11.000 pelaku usaha	Rp 114.999.980,00	DAU				

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perang kat Daerah Pelaks ana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikato r Subkegia tan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/.. disebutkan)	Lokasi sasaran			Ket era nga n
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelura han	Kecama tan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)							
			Pengolahan Data Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Subkegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah , dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokume n	Rp 19.990.00 0					

3.3.4. **Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Inovasi Perangkat daerah**

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan investasi daerah 6 (enam) program yaitu program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan. Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi daerah di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal.

Adanya Layanan MPP Digital pada sektor Kesehatan yang terhubung pada sistem SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan). Perizinan Prekterk tenaga medis dan Tenaga kesehatan.

Tabel 3.5

Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2026

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
SMART Versi 2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
Layanan Izin Usaha Jemput Bola	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp 400.000.000,00
JEMPOL DIIT	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp 100.000.000,00

SIMPELPOT AS	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000,0 0

Inovasi Pelayanan adalah upaya pembaruan atau pengembangan yang dilakukan dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna layanan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, DPMPSTP Kabupaten Pasuruan harus terus dan berkesinambungan meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Seperti yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 1 “Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah”. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dituntut untuk terus berinovasi dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas. Menurut Permenpan ini bahwa Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang baik merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa inovasi pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan :

a. SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu)

Merupakan pengembangan sistem aplikasi perizinan secara online yang dibangun pada aplikasi perdana yaitu SIAP MASLAHAT dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi yang lokal yang tidak mengcover perizinan pada sistem OSS. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas pelayanan publik dari DPMPSTP Kabupaten Pasuruan.

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektonik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sebagai OSS berdampak besar terhadap revolusi sistem pelayanan publik di Indonesia.

Pelimpahan wewenang perizinan dan non-perizinan DPMPTSP oleh Bupati Kabupaten Pasuruan mengalami perubahan beberapa kali. Perbup Pasuruan No. 88 Tahun 2019 menjelaskan DPMPTSP melayani 84 jenis dokumen. Seiring dengan sosialisasi OSS, kewenangan DPMPTSP dirampingkan untuk melayani 21 jenis dokumen (PerBup Pasuruan No. 63 Tahun 2020). Selanjutnya, Perbup Pasuruan No. 126 Tahun 2021 lebih merincikan kembali dengan membagi kategori izin menjadi KBLI (dengan OSS RBA), Non-KBLI dan non-perizinan.

Era transformasi digital melalui PP No. 95/2018 mendorong digitalisasi pelayanan publik dengan keras. Data menunjukkan bahwa persentase terbit dokumen di tahun 2020 sebesar 80.89% (tidak termasuk OSS). Sehingga, DPMPTSP Kab. Pasuruan merancang program perizinan dan non-perizinan elektronik yang belum difasilitasi oleh OSS-RBA melalui portal <https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id/> yang selanjutnya disebut sebagai SIAPMASLAHAT.

SIAPMASLAHAT diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memperoleh layanan legalitas perizinan dan non perizinan. SIAPMASLAHAT adalah inovasi yang sedang dioptimalikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pasuruan untuk mensiasati pelayanan publik di masa ini. Setiap OPD teknis digandeng untuk bekerjasama memberikan pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Peran penting koordinasi menjadi hal utama, meskipun kini tidak lagi harus bertatap muka.

Di tahun 2025 kami mengembangkan sistem aplikasi guna penyempurnaan sistem baru yang dinamakan SMART (**Sistem Management Adinistrasi Perizinan Terpadu**). Keunggulan sistem ini adalah sudah terintegrasi dengan OPD Tekhnis, terintergrasi pembayaran Virtual Account dengan per bankkan, Trakcing pelaporan izin bisa di lihat per tanggal. Dengan demikian memudahkan bagi pemohon untuk mentrakcing pengajuan perizinannya melalui sistem tanpa harus datang ke Mall Pelayanan Publik.

Dengan hadirnya aplikasi SMART sebagai inovasi pengembangan sistem pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

b. Mal Pelayaaan Publik

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui konsep “satu

tempat untuk semua layanan”, MPP mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari instansi pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta, sehingga masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tuntutan era modern yang mengutamakan efisiensi, kepastian, serta kenyamanan dalam memperoleh layanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan berwibawa, setiap kebijakan daerah perlu dituangkan dalam bentuk regulasi yang jelas dan terarah. Salah satu aspek penting dalam mendukung kinerja aparatur sipil negara adalah penetapan pakaian dinas sebagai identitas serta simbol kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bupati Pasuruan menetapkan sebuah keputusan yang mengatur pakaian dinas bagi petugas layanan pada perangkat daerah tertentu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 800.1.12.5/616/HK/424.013/2025 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar Surat Keputusan Bupati terkait Pakaian Dinas Petugas Layanan Perangkat Daerah Tertemtu

Dengan adanya keputusan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menerapkan aturan terkait pakaian dinas secara konsisten sehingga tercipta keseragaman, kedisiplinan, serta citra positif aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan pakaian dinas bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen

pemerintah daerah dalam membangun profesionalitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan kualitas pelayanan pemerintah semakin meningkat melalui penyediaan layanan yang cepat,

transparan, dan terintegrasi. MPP bukan hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga simbol transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Pameran Skala Nasional

Pameran Skala Nasional merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan dan diikuti oleh DPMPSTSP sebagai ajang promosi potensi daerah. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat luas dalam lingkup nasional. Dengan partisipasi aktif dalam pameran tersebut, daerah memiliki kesempatan untuk menampilkan identitas, karakteristik, serta potensi unggulannya secara lebih terarah dan profesional.

Melalui keikutsertaan dalam pameran berskala nasional ini, Kabupaten Pasuruan dapat menunjukkan eksistensinya sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan dari setiap kecamatan kepada publik. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengamatan dan pembelajaran dari perkembangan yang ditampilkan oleh kabupaten maupun kota lain. Dengan demikian, partisipasi dalam pameran nasional tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.

d. Investment Gathering

Investment Gathering merupakan sebuah forum strategis yang mempertemukan para pengusaha dengan Kepala Daerah serta jajaran dinas terkait. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Melalui pertemuan ini, tercipta ruang dialog yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan dan iklim penanaman modal di daerah.

Investment Gathering merupakan sebuah forum strategis yang mempertemukan para pengusaha dengan Kepala Daerah serta jajaran dinas

terkait. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Melalui pertemuan ini, tercipta ruang dialog yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan dan iklim penanaman modal di daerah.

e. Kantor Imigrasi Kelas 3

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian serta menunjang kelancaran mobilitas tenaga kerja, pelajar, dan pelaku usaha internasional dari dan menuju Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyatakan kesanggupan penuh untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembentukan Kantor Imigrasi di Bangil sebagai bagian dari upaya strategis pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan sanggup menyediakan gedung operasional yang layak dan sesuai standar pelayanan publik untuk mendukung berjalannya seluruh fungsi administrasi dan teknis Kantor Imigrasi. Lokasi gedung akan dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat, keamanan, dan integrasi dengan infrastruktur pemerintahan serta layanan publik lainnya.

Selain itu, dukungan personil administratif dari pemerintah daerah juga akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Personil yang ditugaskan akan diberikan pelatihan dasar mengenai tugas pendukung operasional imigrasi, serta dikoordinasikan secara aktif dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia guna menjamin kelancaran transisi dan pembentukan struktur organisasi kantor.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyatakan komitmen untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan melalui mekanisme penganggaran daerah, baik untuk kebutuhan awal operasional maupun dukungan teknis lainnya. Komitmen anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan terjangkau.



Gambar Surat Pernyataan Komitmen Bupati Pasuruan untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan Kantor Imigrasi di wilayah Kabupaten Pasuruan

Berikut secara detail beberapa hal yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk pembentukan Kantor Imigrasi Bangil di Bangil Kabupaten Pasuruan:

- Lokasi

Lokasi yang telah terbangun untuk Kantor Imigrasi Bangil di Bangil Kabupaten Pasuruan berada di Jalan Dr. Soetomo yang dulunya merupakan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil.

- Luas Lahan dan Luas Bangunan

Bangunan Kantor Imigrasi Bangil terbangun di atas hamparan lahan seluas ± 1,5 ha, dengan bangunan seluas ± 624 m².

- Fasilitas yang Tersedia

Selain untuk Kantor Imigrasi Bangil, terdapat beberapa bangunan yang sudah terbangun pada kawasan tersebut, seperti LABKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Keberadaan LABKESDA yang berdekatan, tentunya akan sangat mendukung kegiatan keimigrasian. LABKESDA ini nantinya akan memberikan kemudahan para pemohon penerbitan paspor jama'ah haji/umroh untuk memperoleh vaksin sebelum mereka pergi ke tanah suci. Sedangkan keberadaan Dinas Tenaga Kerja dengan layanan keimigrasian sangat erat kaitannya dengan pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan untuk mempermudah proses

pembayaran paspor, akan disediakan pula PT. Pos Indonesia pada lokasi tersebut.

- **Sarana dan Prasarana**

Selain keberadaan gedung yang telah terbangun, beberapa sarana penunjang seperti peralatan yang dibutuhkan untuk layanan keimigrasian telah disediakan sejak tahun 2024. Peralatan-peralatan yang telah dibelanjakan didanai menggunakan anggaran tahun 2024 tersebut, antara lain Printer Stiker Ijin Tinggal WNA, Scanner Sidik Jari, Kamera Digital, Printer ID Card, Mesin Laminasi, Printer Paspor, Scanner MRTD, Scanner Berkas, Signature Pad, UPS Server, Server, Rak Server, Printer, Desktop PC, Kontrol Server, Switch 24 Port, serta Notebook.

- **Anggaran Untuk kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan dukungan penuh di bidang penganggarnya. Hal ini dibuktikan dengan telah direalisasikannya belanja untuk kebutuhan keimigrasian pada tahap I di tahun 2024 sebesar ± Rp 1.543.183.700 dan pada tahun 2025 telah direncanakan penganggaran pada tahap II untuk revitalisasi bangunan Kantor Imigrasi senilai ± Rp.1.147.424.730.

- **Sumber Daya Manusia**

Kebutuhan personil untuk mencukupi kebutuhan Kantor Imigrasi Bangil dilakukan dengan menyediakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang siap untuk dimutasikan menjadi pegawai kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Dengan adanya kesanggupan ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III di Bangil Kabupaten Pasuruan dapat segera direalisasikan sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemudahan layanan serta pertumbuhan ekonomi berbasis globalisasi tenaga kerja investasi.

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung IK RPKPD di tahun 2026 sebagai berikut;

IUP IK RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada / Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Realisasi investasi daerah	Realisasi investasi adalah besaran jumlah investasi yang tercatat setiap akhir tahun di Badan Koordinasi Penanaman Modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri	IKU	13 T - 16, 51 T	ada	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal
					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Promosi Penanaman Modal
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

IUP IK RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentu k (Metadata)	Targ et 202 6	Ada / Tida k	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/ Kota	
					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
					Pengawasan Penanaman Modal		
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaa n Data dan Sistem Informasi Penanama n Modal DL

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2026 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

1. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Pelaku Usaha;
4. Masyarakat Umum Penanaman Modal..

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi	DP MP TS P	80%			5.465.568.520	DAU		80%	5.395.352.272 ,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	PEMERINTAHAN DAERAH/ KOTA		Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi								
2.18.1.2 .01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%			57.533.500		100%	58.981.532,97
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		4			Rp 8.981.000,00		4	Rp 9.215.220,47
						Belanja operasi		: Rp 8.981.000,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 8.981.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	DP MP TS P	12			Rp 9.585.000,00	DAU		12	Rp 9.824.625,00
						Belanja operasi		Rp 9.585.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp 9.585.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan	5				Rp 38.967.500,00	DAU		5	Rp 39.941.687,50
						Belanja operasi		: Rp 38.967.500,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Belanja barang dan jasa	: Rp 38.967.500,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya laporan keuangan yang akurat	DP MP TS P	100%			Rp 3.561.502.721, 00			100%	Rp 3.650.540.289 ,03

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			dapat dipertanggungja wabkan								
2.18.1.2 .02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)		21			Rp 3.467.542.721, 00	DAU	21	Rp 3.554.231.289 ,03
						Belanja operasi		Rp : 3.467.542.721, 00			
							Belanja pegawai	Rp : 3.467.542.721, 00			
							Belanja barang dan jasa	: Rp -			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja modal		: Rp -			
							Belanja tidak terduga		: Rp -			
							Belanja transfer		: Rp -			
2.18.1.2 .02.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)		24				Rp 30.000.000,00		24	Rp 30.750.000,00
							Belanja operasi		: Rp 30.000.000,00			
								Belanja pegawai	: Rp -			
								Belanja barang dan jasa	: Rp 30.000.000,00			
								Belanja bunga	: Rp -			
								Belanja subsidi	: Rp -			
								Belanja hibah	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .02.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifik asi keuangan SKPD (dokumen)		12			Rp 63.960.000,00			12	Rp 65.559.000,00
						Belanja operasi		: Rp 63.960.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 63.960.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Belanja hibah		: Rp -			
						Belanja bantuan sosial		: Rp -			
						Belanja modal		: Rp -			
						Belanja tidak terduga		: Rp -			
						Belanja transfer		: Rp -			
2.18.1.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	DP MP TS P	100%			Rp 172.287.500,0 0	DAU	100%	Rp 140.000.000,0 0
2.18.1.2 .05.9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	DP MP TS P	5			Rp 89.920.000,00		4	Rp 70.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 89.920.000,00			
						Belanja pegawai		: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja barang dan jasa	: Rp 89.920.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.1.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan		55			Rp 82.367.500,00	DAU	43	Rp 70.000.000,00
							Belanja operasi	: Rp 82.367.500,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perundang-undan gan	Perundang-Undan gan	perundang-unda ngan (orang)				Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 82.367.500,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal		: Rp -			
						Belanja tidak terduga		: Rp -			
						Belanja transfer		: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.1.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%			455.729.990	DAU		100%	433.069.750,0 0
2.18.1.2 .06.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	DP MP TS P	2			Rp 10.149.400,00		2	3	Rp 10.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 10.149.400,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 10.149.400,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .06.4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)		3			Rp 125.112.450,00			3	Rp 110.000.000,00
							Belanja operasi	: 125.112.450,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp 125.112.450,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.1.2 .06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1				Rp 23.900.000,00		1	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 23.900.000,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 23.900.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.1.2 .06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan gan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan gan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-unda ngan yang disediakan (laporan)		12			Rp 3.102.500,00		12	Rp 3.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 3.102.500,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 3.102.500,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bunga	:	Rp -			
							Belanja subsidi	:	Rp -			
							Belanja hibah	:	Rp -			
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
							Belanja modal	:	Rp -			
							Belanja tidak terduga	:	Rp -			
							Belanja transfer	:	Rp -			
2.18.1.2 .06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)		12				Rp 98.275.640,00		12	Rp 90.000.000,00
						Belanja operasi		:	Rp 98.275.640,00			
							Belanja pegawai	:	Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja barang dan jasa	: Rp 98.275.640,00			
								Belanja bunga	: Rp -			
								Belanja subsidi	: Rp -			
								Belanja hibah	: Rp -			
								Belanja bantuan sosial	: Rp -			
								Belanja modal	: Rp -			
								Belanja tidak terduga	: Rp -			
								Belanja transfer	: Rp -			
2.18.1.2 .06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi		12				Rp 195.190.000,0 0		12	Rp 200.069.750,0 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		dan Konsultasi SKPD	dan konsultasi SKPD (laporan)			Belanja operasi		Rp : 195.190.000,0 0			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	Rp : 195.190.000,0 0			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja transfer		: Rp -			
2.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia		100%			743.089.009	DAU	100%	742.439.762,50
2.18.1.2.08.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	DP MP TS P	2			Rp 1.700.000,00		2	Rp 1.742.500,00
							Belanja operasi		: Rp 1.700.000,00			
								Belanja pegawai	: Rp -			
								Belanja barang dan jasa	: Rp 1.700.000,00			
								Belanja bunga	: Rp -			
								Belanja subsidi	: Rp -			
								Belanja hibah	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)		12			Rp 625.070.500,0 0			12	Rp 640.697.262,5 0
							Belanja operasi	Rp : 625.070.500,0 0				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp : 625.070.500,0 0				
							Belanja bunga	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja subsidi	:	Rp -				
							Belanja hibah	:	Rp -				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal		:	Rp -				
						Belanja tidak terduga		:	Rp -				
						Belanja transfer		:	Rp -				
2.18.1.2 .08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		2			Rp 116.318.509,0 0			2	Rp 100.000.000,0 0	
						Belanja operasi		Rp : 116.318.509,0 0					
							Belanja pegawai	:					Rp -

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja barang dan jasa	Rp : 116.318.509,0 0				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan BMD yg terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%			275.000	DAU		100%	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia (unit)		0			Rp -		0	Rp -
						Belanja operasi		: Rp -			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp -			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal		: Rp -			
						Belanja tidak terduga		: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja transfer	: Rp -				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0			Rp 275.000,00			0	Rp -
							Belanja operasi	: Rp 275.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 275.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja tidak terduga		: Rp -			
							Belanja transfer		: Rp -			
2.18.1.2 .09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik		100%			475.150.800	DAU	100%	370.320.937,5 0
2.18.1.2 .09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	DP MP TS P	1			Rp 87.337.500,00		1	Rp 89.520.937,50
							Belanja operasi		: Rp 87.337.500,00			
								Belanja pegawai	: Rp -			
								Belanja barang dan jasa	: Rp 87.337.500,00			
								Belanja bunga	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.1.2 .09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (unit)	12				Rp 59.999.800,00		12	Rp 55.800.000,00
						Belanja operasi		: Rp 59.999.800,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 59.999.800,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.1.2 .09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (unit)		176			Rp 117.813.500,0 0			50	Rp 75.000.000,00
						Belanja operasi		Rp : 117.813.500,0 0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja pegawai	: Rp -		
								Belanja barang dan jasa	: Rp 117.813.500,00		
								Belanja bunga	: Rp -		
								Belanja subsidi	: Rp -		
								Belanja hibah	: Rp -		
								Belanja bantuan sosial	: Rp -		
								Belanja modal	: Rp -		
								Belanja tidak terduga	: Rp -		
								Belanja transfer	: Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.1.2 .09.	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (unit)		5			Rp 210.000.000,0 0		5	Rp 150.000.000,0 0
						Belanja operasi		Rp : 210.000.000,0 0			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	Rp : 210.000.000,0 0			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal		: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja tidak terduga		: Rp -			
							Belanja transfer		: Rp -			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-			-
	Bidang Penanaman Modal								-			-
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Tercapainya kepuasan investor terhadap pengembangan iklim PM	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal		82,5			621.354.000	DAU	PP / Prori s No. 19	82 330.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal		100%			23.000.000			100% 10.000.000,00
	penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)		1			Rp 23.000.000,00		1	Rp 10.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 23.000.000,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 23.000.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.2.2 .02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya kebijakan penanaman modal berbasis potensi investasi		2			598.354.000	(diisi)		2	320.000.000,0 0
2.18.2.2 .02.1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum		1			Rp 292.145.000,0 0			1	Rp 160.000.000,0 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)			Belanja operasi		Rp : 292.145.000,0 0			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	Rp : 292.145.000,0 0			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
						Belanja modal		: Rp -			
						Belanja tidak terduga		: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja
						Belanja transfer		: Rp -				
2.18.2.2 .02.2		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota (dokumen)	1			Rp 306.209.000,00			1	Rp 160.000.000,00
						Belanja operasi		Rp : 306.209.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp : 306.209.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja modal		: Rp -			
							Belanja tidak terduga		: Rp -			
							Belanja transfer		: Rp -			
		Fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota	Tercapainya pelaksanaan badan usaha yang mendapatkan fasilitasi Hilirisasi Investasi	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan fasilitasi Hilirisasi Investasi (badan usaha)	0				0			
		Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota (badan usaha)	0				Rp -			
							Belanja operasi		: Rp -			
								Belanja pegawai	: Rp -			
								Belanja barang dan jasa	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bunga	:	Rp -			
							Belanja subsidi	:	Rp -			
							Belanja hibah	:	Rp -			
							Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
							Belanja modal	:	Rp -			
							Belanja tidak terduga	:	Rp -			
							Belanja transfer	:	Rp -			
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi	Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor		72%			250.000.000	DAU	PP / Prori s No. 19	70% 115.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	tercapainya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana		100%			250.000.000	(diisi)		100%	115.000.000
2.18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota (dokumen)	2				Rp 247.000.000,00			3	Rp 112.000.000,00
						Belanja operasi		Rp : 247.000.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp : 247.000.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Rencana Tahun 2026				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/ kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal (dokumen)		1		Rp 3.000.000,00			1	Rp 3.000.000,00
							Belanja operasi	: Rp 3.000.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 3.000.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko		92			262.003.280	DAU	PP / Proris No. 19	94	130.000.000
2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi		terlayaninnya permohonan pemenuhan komitmen dan konsultasi perizinan dan non perizinan		10550			262.003.280			100000	130.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		perizinan berusaha dan non perizinan pm bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi dan pengaduan (pelaku usaha)								
	Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	1				Rp 17.000.000,00		0	
						Belanja operasi		: Rp 17.000.000,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 17.000.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
2.18.4.2 .01.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi		510			Rp 114.999.980,0 0		Poko k Pikira n	520	Rp 60.000.000,00
							Belanja operasi	Rp : 114.999.980,0 0				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	Rp : 114.999.980,0 0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			secara elektronik (pelaku usaha)				Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.4.2 .01.2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang perizinan	62				Rp 80.005.660,00		63	Rp 40.000.000,00
						Belanja operasi		: Rp 80.005.660,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				Belanja barang dan jasa	: Rp 80.005.660,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.4.2 .01.3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi		200			Rp 49.997.640,00		220	Rp 30.000.000,00
							Belanja operasi	: Rp 49.997.640,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)				Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 49.997.640,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha		71%			204.429.000	DAU	PP No. 19 / Prori s	72% 125.000.000,0 0
2.18.5. 2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Terlaksananya Pengendalian palaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana	Jumlah Pengendalian palaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana (kegiatan)		12			204.429.000			25 125.000.000,0 0
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	jumlah penyelesaian permasaahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)		10			Rp 111.918.000,0 0			12 Rp 70.000.000,00
						Belanja operasi		Rp : 111.918.000,0 0			
							Belanja pegawai	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Belanja barang dan jasa	Rp : 111.918.000,0 0			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.5.2 .01.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi		150			Rp 45.721.000,00	DAU	150	Rp 30.000.000,00
							Belanja operasi	: Rp 45.721.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 45.721.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			
2.18.5.2 .01.3	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan	jumlah kegiatan usaha dari		15			Rp 46.790.000,00		16	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)			Belanja operasi		: Rp 46.790.000,00			
							Belanja pegawai	: Rp -			
							Belanja barang dan jasa	: Rp 46.790.000,00			
							Belanja bunga	: Rp -			
							Belanja subsidi	: Rp -			
							Belanja hibah	: Rp -			
							Belanja bantuan sosial	: Rp -			
							Belanja modal	: Rp -			
							Belanja tidak terduga	: Rp -			
							Belanja transfer	: Rp -			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		100%			19.990.000	DAU	PP / Prori s No. 33	100%	17.000.000,00
2.18.6.2. 01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota</i>	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi.	Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi (laporan)	4				19.990.000	(diisi)		4	17.000.000,00
2.18.6.2 .01.1	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	4				19.990.000			4	17.000.000
						Belanja operasi		: Rp 19.990.000,00				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 19.990.000,00				
							Belanja bunga	: Rp -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Dimanfaatkan (dokumen)				Belanja subsidi	: Rp -			
								Belanja hibah	: Rp -			
								Belanja bantuan sosial	: Rp -			
								Belanja modal	: Rp -			
								Belanja tidak terduga	: Rp -			
								Belanja transfer	: Rp -			
								Total Belanja operasi	: Rp 6.823.344.80 0			
								Belanja pegawai	: Rp 3.467.542.721			
								Belanja barang dan jasa	: Rp 3.355.802.079			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Belanja bunga	: Rp -			
								Belanja subsidi	: Rp -			
								Belanja hibah	: Rp -			
								Belanja bantuan sosial	: Rp -			
								Total Belanja modal	: Rp -			
								Total Belanja tidak terduga	: <i>Rp -</i>			
								Total Belanja transfer	: <i>Rp -</i>			
									6.823.344.800			6.112.352.27 2

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO